

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Literasi keuangan dalam beberapa kurun waktu belakang ini banyak diperbincangkan. Perhatian khusus terhadap literasi keuangan dikarenakan oleh harapan suatu Negara untuk memiliki penduduk yang mempunyai kecerdasan dalam pengelolaan finansial dan berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi yang baik pada Negara tersebut. Setiap manusia harus memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola finansialnya secara efektif demi kesejahteraan.

Otoritas Jasa Keuangan (2013:11) menyatakan bahwa literasi keuangan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat akan lembaga keuangan serta produk dan jasanya. Literasi keuangan ini berhubungan dengan bagaimana cara masyarakat tersebut dapat mengelola dan melakukan perencanaan finansialnya sebaik mungkin. Menurut Lusardi dan Mitchell (2007) dalam Rosyid (2012), literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya literasi keuangan dapat berdampak kepada kurangnya akses masyarakat ke lembaga keuangan dan hal ini dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Tujuan dari literasi keuangan ini sendiri adalah agar pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nantinya akan berguna untuk kehidupan jangka panjangnya yaitu dengan menginvestasikan pendapatan tersebut untuk pendidikan, maupun untuk hal-hal produktif bukan hanya untuk hal-hal yang konsumtif. Literasi keuangan sangat diperlukan dalam suatu Negara untuk meningkatkan pembangunan di suatu Negara.

Manfaat literasi keuangan secara umum sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar masyarakat yang sudah mengetahui mengenai produk-produk dan jasa layanan lembaga keuangan yang ada. Hal ini sangat penting agar kedepannya pemerintah dapat menyusun program-program edukasi keuangan yang diperlukan masyarakat. Dan untuk kelompok masyarakat yang selama ini kurang atau bahkan tidak mendapatkan akses produk dan jasa keuangan diharapkan dapat memperoleh produk dan jasa keuangan yang terjangkau sederhana, namun memiliki manfaat yang berguna bagi kelompok masyarakat tersebut.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013 ([www.sikapuangmu.ojk.ac.id](http://www.sikapuangmu.ojk.ac.id)) dinyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia masih sangat rendah.

Menurut data dari Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2016 masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* hanya sebesar 21,84% pada tahun 2013, dan mengalami peningkatan 7,82%

menjadi 29,66% pada tahun 2016. Dalam kurun waktu 3 tahun kenaikan Literasi keuangan hanya 7,82%.

Sedangkan, menurut Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik ini menjadi permasalahan. Hal ini pun bisa dilihat pada Survei Neraca Rumah Tangga (2011) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak memiliki tabungan di lembaga keuangan formal maupun nonformal masih relative tinggi yaitu 52%. (Booklet Keuangan Inklusif,2014). Hasil ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan Negara asia. Misalnya Malaysia, 65% penduduk di Negara nya telah memiliki pemahaman keuangan yang baik. Selaian itu Negara Thailand dan Malaysia memiliki akun bank, sementara di Indonesia hanya 41%. (Desiyana dalam Muat, *et al.*, 2015).

Berdasarkan persentase di atas telah menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia relatif rendah, dan akses produk dan jasa ke lembaga keuangan pun juga rendah. Pemerintah pun telah berupaya untuk terus meningkatkan literasi keuangan salah satu caranya yaitu dengan, edukasi keuangan kepada masyarakat sejak usia dini. Otoritas Jasa Keuangan telah mengusun program Strategi Nasional Literasi Keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia

namun upaya ini masih kurang dan masih sangat memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah. Agar masyarakat yang kurang bahkan belum dapat mengakses produk dan jasa lembaga keuangan dapat mengakses hal tersebut.

Edukasi keuangan, pemahaman akan literasi keuangan sangat diperlukan di masyarakat kalangan bawah atau bisa disebut masyarakat marginal. Masyarakat marginal sendiri berasal dari bahasa Inggris "*marginal*" yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya, marginal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marginal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan (masyarakat kelas bawah).

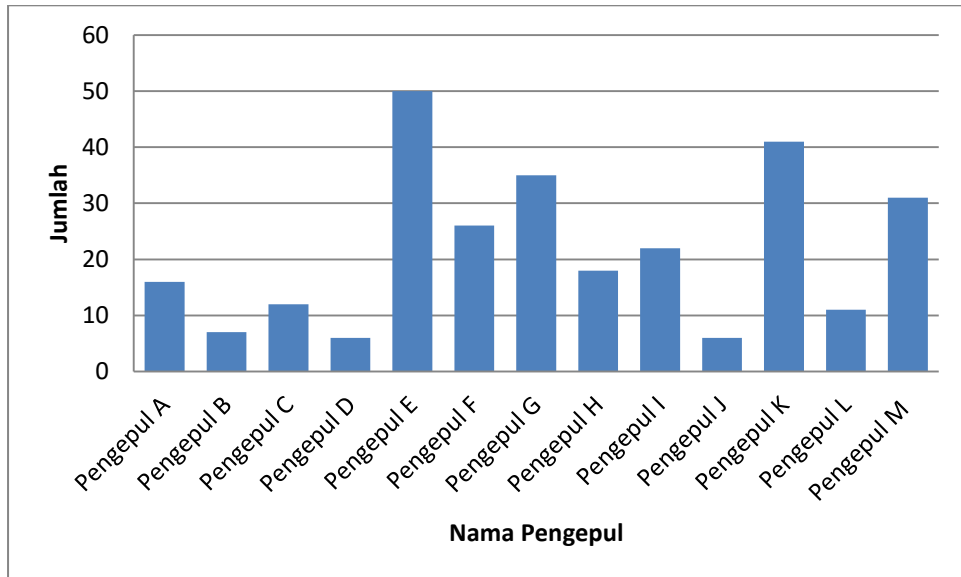
Masyarakat marginal sering tersisihan dari pembangunan sehingga masyarakat ini kurang atau bahkan tidak bisa menikmati pembangunan. Penyandang disabilitas, buruh migran, kelompok asongan, dan pemulung adalah termasuk dalam kelompok marginal. Kelompok-kelompok ini khususnya pemulung bisa dikatakan *unbankable people* atau bisa disebut masyarakat yang belum bisa mengakses ke lembaga keuangan dan kurang mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan bank atau non bank.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta

memanfaatkan barang bekas (seperti putung rokok) dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas orang yang memulung. Manusia termaksud pemulung sebagai pelaku ekonomi harus memenuhi kebutuhannya tidak hanya keperluan jangka pendek, kebutuhan dan persiapan jangka panjang pun harus turut di persiapkan seperti *saving dan Investment*. Masyarakat pemulung adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan yang rendah, dari penghasilan tersebut digunakan untuk hal yang konsumtif.

Daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km. di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat satu Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yaitu di Piyungan. Piyungan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Piyungan terletak di perbatasan antara 3 wilayah Kabupaten di Yogyakarta, yaitu antara wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, serta antara wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Piyungan memiliki 3 kelurahan yaitu Kelurahan Sitimulyo, Kelurahan Srimulyo dan Kelurahan Srimartani. Di TPST Piyungan Bantul, terdapat banyak pemulung. Menurut data dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2016, jumlah pemulung di TPST

Piyungan adalah 281 pemulung.data yang di dapatkan dari MPM PP Muhamadiyah ini berdasarkan Pengepul yang ada di TPST Piyungan, DIY.



Sumber: Data Primer yang di Olah

**GAMBAR 1.1**

**Jumlah Pemulung di TPST Piyungan Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk**

Menurut gambar di atas, jumlah pemulung yang ada di pengepul A sebanyak 16 orang, pengempul B sebanyak 7 orang, pengepul C sebanyak 12 orang, pengepul D sebanyak 6 orang, pengepul E sebanyak 50 orang pemulung, pengepul F sebanyak 26 orang, pengepul G sebanyak 35 orang, pengepul H sebanyak 18 orang, pemulung yang berada di pemulung I sebanyak 22 orang, yang berada di pemulung J sebanyak 6 orang pemulung, pengepul K sebanyak 41 orang, yang berada di pengepul L

sebanyak 11 orang sedangkan di pengepul M sebanyak 31 orang pemulung.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Pemulung TPST Piyungan**

No	Sumber Pendapatan	Pendapatan Perbulan (Rp)
1	Pemulung	Rp 1.173.636
2	Pengepul	Rp. 3.515.385

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Dari tabel diatas menunjukkan pendapatan yang di miliki oleh pemulung, pendapatan perbulan yang dihasilkan oleh pemulung adalah rata-rata sebesar Rp 1.173.636. sedangkan rata-rata penghasilan yang di dapatkan oleh pengepul adalah sebesar Rp. 3.515.385. Pendapatan masyarakat pemulung di TPST Piyungan berkisar antara 500.000 sampai 1.500.000 juta perbulan hal ini bisa di lihat data dari Pengelola TPST Piyungan.

Data di atas secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pendapatan yang di dapat oleh pemulung di TPST Piyungan hanya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat pemulung mengenai perencanaan keuangan perlu adanya edukasi dan pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan. Dengan alasan banyak pemulung memiliki latar belakang pendidikan minim dan usia mereka yang bisa dikatakan tidak muda lagi. Sehingga edukasi finansial (*financial education*) sangat dibutuhkan di kalangan pemulung.

Berdasarkan latar belakang di atas terkait pentingnya pemahaman akan pentingnya literasi keuangan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat atas maupun masyarakat marginal khususnya pemulung TPST Piyungan, agar pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut dan pemulung dapat merencanakan keuangannya untuk masa depan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang literasi keuangan (*financial literacy*) pada pemulung di TPST Piyungan dengan judul “ **Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pemulung Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul Yogyakarta**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas yang sudah dituliskan, telah didapatkan beberapa rumusan masalah mengenai tingkat literasi keuangan pada kelompok pemulung TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

- a. Bagaimana tingkat Literasi Keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan jenis kelamin ?
- c. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan usia ?



- d. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan tingkat pendidikan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan jenis kelamin.
- c. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan usia.
- d. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pada masyarakat Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Tingkat pendidikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Kelompok Pemulung TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan keuangan.

- b. Pemerintah dan perbankan, sebagai referensi agar dapat membantu penyediaan produk dan jasa keuangan untuk Pemulung.
- c. Akademisi, sebagai literatur untuk membuat makalah atau skripsi selanjutnya.

#### **E. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat Literasi Keuangan di masyarakat Pemulung, TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk meneliti perbedaan literasi keuangan berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan.